

## Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Eropa

Tantri Yudikati  
Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum  
Email: [yudikatitantri2@gmail.com](mailto:yudikatitantri2@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebijakan negara-negara Eropa, seperti Prancis, dan Swedia, terhadap sekolah Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dari *policy research* dan *action reaseach*. *Evaluation reseach* mencakup *policy evaluation and research of program planning*. Teknik analisis kebijakan merentang dari ragam pegamatan sampai ragam analisis kepentingan publik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan normatif, untuk menverifikasi proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembentukan kebijakan. Temuan inti kajian ini sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan pendanaan, Prancis hanya mendanai sekolah Islam yang benar-benar mengikuti peraturan pendidikan nasional sedangkan Swedia mendanai semua sekolah Islam; Kedua, untuk kebijakan kurikulum, Prancis mengintegrasikan PAI ke dalam matapelajaran lain di sekolah publik. Sedangkan Swedia meyerahkan kurikulum PAI kepada masing-masing sekolah Islam; Ketiga, berkaitan dengan guru, Prancis mengarahkan mereka mengambil matakuliah yang memuat topik agama. Adapun Swedia mewajibkan mereka mengambil kursus ilmu pendidikan setingkat pascasarjana.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pendidikan Islam, Eropa

### Pendahuluan

Perkembangan pendidikan suatu bangsa sangat terkait dengan kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa, baik itu kebijakan dalam bidang politik maupun agama, hampir dapat dipastikan kebijakan politik akan memiliki dampak terhadap dunia pendidikan (Made Saihu, Sawaluddin Siregar, 2022). Demikian pula pendidikan Islam di masa kolonial Belanda sangat terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kolonial. Pada dasarnya pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda untuk kaum pribumi yang notabene muslim pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdikan kepada kepentingan Belanda (Faisal Musa, Sawaluddin). Dengan kata lain pendidikan dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat memperkuat kedudukan penjajah, karena itu tujuan pendidikan diarahkan untuk kepentingan kolonial, sehingga isi pendidikan itupun hanya sekedar pengetahuan dan kecakapan yang dapat membantu mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah (Dedi Supriyadi, 2016).

Tetapi masa itu tinggal sebuah sejarah. Bangsa-bangsa Eropa kini menjadi pemimpin dunia dalam kemajuan IPTEK, setelah masa kemunduran peradaban Islam (Jorgen S. Nelsen, Muslims in Western Europe, 1995). Saat ini, Eropa telah menjadi pusat industri dunia, dengan lahirnya revolusi industri pertama di Inggris pada abad ke-17 dan sekarang telah berkembang menjadi revolusi industri 4.0.3 Di banyak negara Eropa, Muslim merupakan kelompok minoritas, tetapi semakin menarik perhatian bagi akademisi dan kalangan awam. Studi-studi tentang minoritas muslim menunjukkan peningkatan, terutama setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika dan peristiwa yang terjadi di beberapa negara Eropa, seperti Inggris dan Spanyol.<sup>4</sup> Peristiwa ini seringkali dikaitkan dengan kelompok Muslim tertentu, terutama yang

dikategorikan sebagai Muslim radikal dan fundamentalis. Bahkan gelombang Islamofobia bermunculan di beberapa negara Eropa (EUMC, 2006).

Akibatnya, Islam dan kaum Muslim di dunia menjadi sorotan dan perhatian bagi para pengambil kebijakan politik di negara-negara Eropa (Ahmad Nur Fuad, 2014). Di beberapa negara Eropa, seperti: Swedia persebaran populasi Muslim cukup tinggi, bahkan jumlahnya diperkirakan meningkat dua kali lipat atau lebih. Komposisi penduduk Muslim dan sarana ibadah di negara-negara tersebut meningkat pula. Pada tahun 2015 populasi Muslim dunia mencapai 24.1 persen dan diperkirakan akan mencapai 32% pada satu dekade berikutnya. Ini karena penduduk muslim memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi (Michael Lipka and Conrad Hackett, 2018). Pergeseran demografi ini telah menyebabkan pergolakan politik dan sosial di Eropa, terutama setelah kedatangan jutaan para pencari suaka yang kebanyakan adalah Muslim.

Pergeseran demografis ini telah memunculkan diskusi-diskusi dan wacana mengenai penyediaan pendidikan Islam bagi anak-anak Muslim, misalnya sekolah-sekolah Muslim, masjid, dan organisasi Islam, karena pendidikan agama adalah tujuan penting bagi kaum Muslim (Ednan Aslan, 2019). Banyak pemuda Muslim dan bahkan orang dewasa menghadiri kelas-kelas Islam yang dikelola secara privat dan berbentuk ekstrakurikuler. Banyak anak-anak Muslim bersekolah di sekolah Islam swasta ataupun belajar di rumah (Paul Josza, 2007). Program pendidikan Islam yang didanai dan disediakan oleh negara adalah pilihan yang muncul di beberapa negara Eropa. Program ini tidak hanya menjadi perdebatan terkait kebebasan beragama, persamaan hak atas pendidikan, dan integrasi, tetapi juga terkait masalah keamanan dan kontrol negara terhadap Islam (Robert Hefner and Muhammad Qasim, 2007).

Kajian tentang Muslim dan lembaga pendidikan (sekolah) Islam di Eropa memberikan pemahaman bahwa Islam telah semakin subur di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Pemahaman ini berdampak positif bagi masyarakat non-Eropa, misalnya, untuk menjadikannya sebagai pendidikan bagi anak-anaknya. Adanya dukungan kebijakan pemerintah negara-negara Eropa terhadap pendidikan Islam dapat mengurangi sentimen negatif antar masyarakat berbasis keagamaan. Beberapa penelitian terkait dengan pendidikan agama Islam di negara-negara Eropa lebih berfokus pada materi dan proses pembelajaran pendidikan Islam di lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid. Kajian komprehensif tentang bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di negara-negara Eropa belum banyak dilakukan. Oleh karena itu artikel ini berupaya mengungkap kebijakan negara-negara Eropa terhadap pelaksanaan pendidikan Islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dari policy research dan action reaseach. Evaluation reseach mencakup policy evaluation and research of program planning. Teknik analisis kebijakan merentang dari ragam pegamatan sampai ragam analisis kepentingan publik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan normatif, untuk menverifikasi proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembentukan kebijakan..

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Perkebangn Islam di Eropa**

Islam di Eropa sering menganalogikan Eropa Barat sebagai Kristen atau Yahudi-Kristen, sedangkan Islam dipandang sebagai agama Oriental asing. Narasi ini tidak hanya meniadakan fakta bahwa ketiga agama monoteistik terbesar yang dibentuk di Timur Tengah, tetapi juga termasuk pengaruh bersejarah ilmuwan dan cendekiawan Islam pada pengembangan intelektual Eropa dan sejarah panjang Islam sebagai bagian dari Eropa sejarah. Sehingga dalam pembahasan ini akan mengulas tentang catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Islam telah lama berada di Eropa dan memiliki pengaruh dalam perkembangan peradaban Eropa dengan kata lain bahwa Islam juga merupakan bagian dari sejarah Eropa (Kanisius IKAPI, 2014).

Perjumpaan pertama Eropa dengan Islam telah terjadi lebih awal sebelum wilayah dunia Islam hari ini bertemu dengan Islam, dimulai pada saat jendral dari dinasti Umayyah Tāriq Ibn Ziyād melintasi selat Gibraltar dengan pasukannya dan menaklukkan Kerajaan Visigoths pada tahun 711 dan mulai membangun peradaban Islam pertama di Eropa sejak 80 tahun wafatnya Nabi Muhammad. Kehadiran Islam di Spanyol berlangsung selama lebih dari 780 tahun. Sisilia dan bagian selatan Italia juga berada di bawah kekuasaan Islam dari abad ke-9 hingga abad ke-11. Selain itu terdapat juga minoritas Muslim di bagian Timur dan Tenggara Eropa dimana Islam datang dengan masyarakat penutur bahasa Turki seperti suku Tartar di Rusia dan beberapa suku-suku Turki di wilayah Kesultanan Ottoman (Thomas Schmidinger, 2011).

Serta diikuti pula dengan fenomena migrasi Muslim pada periode kolonialisasi, pekerja, reunifikasi keluarga dan beragam bentuknya lainnya yang menjadi warna dalam fenomena kehadiran Muslim di Eropa. Keberadaan Muslim pada awal sejarah di Eropa tercatat pada saat berdirinya wilayah pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol yang juga menjadi peradaban Islam pertama di Eropa. Peradaban Islam yang pertama dan terkenal yang pernah berdiri kokoh diatas tanah benua Eropa yaitu pemerintahan Islam Al-Andalus. Al-Andalus merupakan nama dalam bahasa Arab yang diberikan kepada bangsa dan wilayah teritorial yang biasanya merujuk pada bangsa Moor di Iberia. Nama tersebut mendiskripsikan bagian dari semenanjung Iberia dan Septimania yang dibawah naungan pemerintahan masyarakat Islam, yang ada pada periode antara tahun 711 sampai 1492 (John L. Esposito, 2016).

Al-Andalus sering disebut juga dengan Andalusia, namun penggunaan istilah itu ambigu karena nama Andalusia merujuk pada nama salah satu daerah administrasi negara modern Spanyol. Pada abad ke sebelas masehi, Al-Andalus juga mencakup bagian Afrika utara dan membentuk entitas budaya tunggal. Dan pemerintahan Al-Andalus telah menjadi awal dari masa kegemilangan negara Muslim Eropa. Setelah penaklukan Muslim atas Spanyol, Al-Andalus dibagi menjadi lima daerah administrasi yang meliputi beberapa wilayah antara lain Andalusia, Galicia dan Portugal, Castile dan León, Aragon dan Catalonia, and Septimania (Joseph F. O'Callaghan, 1983).

Dalam domain politik dan bidang-bidang lainnya, Al-Andalus merupakan provinsi dari Kekhalifahan Umayyah, diprakarsai oleh Khalifah Al-Walid I(711–750), Emirat Cordoba (750–929), Khalifah Cordoba(929–1031), dan Kerajaan Khalifah taifa Cordoba. Peraturan dibawah pemerintahan dan kerajaan ini, dilihat sebagai perkembangan dalam pertukaran budaya (cultural exchange) dan koeksistensi damai antara Muslim, Kristen, dan Yahudi atau yang dikenal dengan convivencia. Dibawah Kekhalifahan Cordoba, al-Andalus telah menjadi

pusat pembelajaran dan kota Cordoba menjadi salah satu pusat budaya dan ekonomi terkemuka baik di kawasan Mediterania maupun di dunia Islam

## **2. Kebijakan Pendidikan Islam di Prancis**

Islamophobia mendapatkan tempat di Prancis, sebagian besar upaya legislatif untuk membatasi ekspresi dan praktik Muslim belum berhasil, termasuk di kampus, tempat kerja, serta memblokir program halal dalam makan siang di sekolah (Velinger Beraud, 2008). Selain itu, sekolah swasta dapat dibuka secara hukum, namun jumlahnya sangat terbatas, karena dikenakan biaya yang tinggi (Muhammad Nabel, tt).

Terdapat tiga jenis sekolah di Prancis, yaitu: sekolah umum, Katolik (disubsidi negara), dan swasta. Di sekolah umum, tampilan simbol agama di fasilitas sekolah sangat dilarang, seperti: jilbab, kipa atau salib besar. Larangan ini sebagaimana undang-undang tahun 2004, menyatakan bahwa pakaian dan simbol agama memanifestasikan afiliasi keagamaan siswa di sekolah negeri tidak diperbolehkan. Akhirnya, sebagian sekolah Muslim yang dikelola swasta berada di bawah kewenangan negara, berarti mereka menerima dana negara untuk gaji para guru, dengan konsekuensi mengikuti kurikulum nasional. Sekolah juga harus berfungsi selama lima tahun agar mendapatkan pendanaan negara. Sekolah Tinggi Averroes merupakan salah satu sekolah Muslim yang menarik banyak perhatian ketika menerima peringkat teratas di Prancis (Brigitte Basdevant, 2004).

Meskipun PAI tidak diajarkan dalam sistem sekolah yang didanai publik Prancis, orang tua yang menginginkan anaknya belajar tentang Islam di luar rumah, mengirim anak-anaknya ke kelas siang atau akhir pekan yang disediakan oleh masjid dan organisasi Islam swasta. Meskipun pendidikan agama di Prancis bukan mata pelajaran sekolah yang terpisah, pendidikan tentang agama kini telah dimasukkan dalam mata pelajaran sejarah dan filsafat. Subjek ini, membahas kontribusi agama terhadap peradaban daripada ritual dan keyakinan agama saja. Misalnya, agama Islam dianggap sangat penting secara historis bagi perkembangan Mediterania, karena kemajuannya dalam bidang al-jabar,

## **3. Kebijakan Pendidikan Islam di Swedia**

Meskipun berkekonotasi religius istilah “sekolah Islam” digunakan untuk mencakup pendidikan agama dan sekuler tentang Islam. Artikel ini menggunakannya sebagai istilah yang luas, mencakup: 1) pengajaran Islam yang disediakan di masjid, organisasi Muslim, dan rumah-rumah Muslim, 2) Pendidikan Agama Islam sebagai subjek di sekolah umum, dan 3) lembaga yang mengajarkan tentang Islam, baik lembaga Muslim maupun non-Muslim.<sup>31</sup> Sekolah-sekolah Islam telah didirikan di banyak negara Eropa seperti Swedia. Berikut dipaparkan bagaimana kebijakan sekolah Islam di lima negara Eropa ini, khususnya berkaitan dengan pendanaan pendidikan, kurikulum PAI, dan pemberdayaan guru PAI.

Pendidikan agama Islam yang didanai publik hanya diajarkan di sekolah Islam, karena tidak ada PAI di sekolah Swedia, kecuali sekolah-sekolah yang berorientasi Muslim (Muhammad Nabel, tt). Setiap sekolah Muslim di Swedia mendidik antara 20 sampai 75 murid. Swedia tidak memiliki tradisi sekolah berdasarkan jenis kelamin. Dalam berpakaian, sekolah merekomendasikan pakaian sederhana, yaitu rok atau celana yang tidak terlalu pendek dan atasan yang tidak terbuka. Meskipun jilbab tidak diperlukan di sekolah-sekolah seperti ini, tetapi beberapa Muslimah dewasa memakainya. Sekolah Muslim Swedia termasuk dalam kategori sekolah independen (*free school*). Sekolah-sekolah seperti itu, sepenuhnya dibiayai negara dan harus memiliki tujuan pendidikan yang sama dan kurikulum dasar

sebagaimana sekolah umum, meskipun mereka diizinkan untuk memiliki profil yang jelas sebagai sekolah Muslim dengan pelajaran PAI 1-3 jam per minggunya (Jonas Otterbeck, 2005). Tidak ada silabus nasional untuk PAI, setiap sekolah bertanggung jawab untuk menyiapkan silabusnya sendiri. Namun, silabus PAI lokal ini harus dirumuskan dengan cara menganut nilai-nilai mendasar yang ditetapkan dalam kurikulum nasional. Pelajaran PAI 1-3 jam perminggu yang diajarkan di sekolah-sekolah Muslim sering terdiri dari kombinasi studi Al-Qur'an, sejarah Islam, dan lagu-lagu yang terkait dengan Islam.

Sisa dari jadwal umum masing-masing sekolah terdiri dari mata pelajaran standar yang ditentukan oleh silabus nasional Swedia. Di beberapa sekolah, pengajian Al-Qur'an diajarkan sebagai bagian dari PAI. Variasi dari konten PAI di berbagai sekolah dapat dikaitkan dengan tradisi interpretatif, pendidikan guru, bahan ajar, populasi siswa, dan pandangan mayoritas masyarakat (Jenny Berglund, 2011). Saat ini belum tersedia bahan ajar berbahasa Swedia untuk PAI, berarti sebagian besar guru mengimpor buku dari negara mayoritas Muslim, tetapi beberapa guru berusaha membuat bahan ajar sendiri (Jenny Berglund, 2010).

Swedia belum memiliki program yang tersedia untuk pelatihan sistematis bagi para guru PAI. Banyak guru PAI menerima pendidikan Islam yang lebih tinggi di negara-negara yang mayoritas Muslim. Namun, menurut Badan Nasional Pendidikan Swedia, guru tersebut tidak cukup memenuhi syarat akreditasi formal, dan ini sesuatu masalah. Karena baik teologi Islam maupun pedagogi Islam tidak ditawarkan oleh universitas di Swedia. Cara sederhana mengatasi masalah ini adalah mengombinasikan kursus Islam yang diambil di universitas asing dengan kursus ilmu pendidikan dari universitas Swedia, karena penggabungan kedua bagian ini akan membuat guru PAI terakreditasi penuh (Bill Gent, 2011).

### **Kesimpulan**

Negara-negara di Eropa memiliki kebijakan terkait sekolah Islam yang berbeda-beda, kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: a) Pendanaan; b) Kurikulum; c) Dan Guru. Pendanaan pada sekolah Islam, di satu sisi, merupakan implikasi dari kewajiban negara untuk memberikan persamaan hak atas pendidikan dan rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, pendanaan negara dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan pendidikan Islam. Meskipun pendanaan sekolah Islam yang mensyaratkan kepatuhan terhadap sistem pendidikan mainstream adalah wajar, mekanisme ini dapat mengurasi kebebasan sekolah Islam dalam menjalankan misi-misi utama mereka. Namun, pemberian dana mengindikasikan kepedulian negara terhadap sekolah Islam dan membuatnya mampu beroperasi secara sejajar dengan sekolah-sekolah lain. Kurikulum di sekolah merupakan media yang paling efisien dalam menanamkan nilai-nilai yang berlaku di suatu negara. Maka, sangat rasional apabila suatu negara yang mendanai lembaga pendidikan memiliki kepentingan terhadap kurikulum yang diajarkan, termasuk pendidikan agama. Negara-negara Eropa telah mengizinkan PAI di sekolah umum dengan tujuan untuk mengenalkan Islam pada warga negara setempat sehingga mengurasi sentimen negatif terhadap Islam. Untuk tipe ini, pendidikan agama Islam lebih dimaknai sebagai kajian historis-akademik, khususnya bagi siswa non-Muslim. Namun bagi Muslim, ini tidak hanya memberikan telaah Islam secara kritis, tapi juga sebagai penguatan pemahaman tentang Islam. Dalam konteks ini guru PAI dapat menjadi agen tidak langsung kebijakan suatu negara terhadap agama. Untuk sekolah Islam, negara-negara Eropa menyerahkan konten PAI sepenuhnya kepada sekolah dan guru PAI. Oleh karenanya, materi-materi PAI tidak hanya

meningkatkan pemahaman sumber dan ajaran Islam, tetapi juga memperkuat keyakinan dan memperkokoh pelaksanaan ajaran-ajarannya ebagaimana guru matapelajaran lainnya, guru PAI di sekolah umum dan guru-guru di sekolah Islam dituntut untuk memenuhi standar profesionalitas. Oleh karenanya, guru PAI diharuskan menguasai ilmu pedagogis baik yang diperoleh dari universitas maupun pusat-pusat pelatihan keguruan.

## Referensi

- Ahmad Nur Fuad, *Minoritas Muslim Di Negara-Negara Non Muslim* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Bill Gent, "Teaching Islam: Islamic Religious Education in Sweden," *Intercultural Education* 22, no. 3(June 2011
- Brigitte Basdevant, *Islam in France, in the Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Lauven: Peeters, 2004
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Ednan Aslan, *Islamic Education in Europe*, Vienna: Bohlau Verlag, 2009
- EUMC, *Muslims In The European Union Discrimination and Islamophobia* Austria: Manz Crossmedia, 2006
- Jenny Berglund, "Global Questions in the Classroom: The Formulation of Islamic Religious Education at Muslim Schools in Sweden," *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education* 32, no. 4 2011
- Jenny Berglund, *Teaching Islam, Islamic Religious Education in Sweden*, Munster: Waxman, 2010
- John L. Esposito, *Oxford Dictionary of Islam*, Oxford Reference Online, Oxford University Press, dalam <http://www.oxfordislamicstudies.com>, Diakses pada 16 Maret 2016
- Jonas Otterbeck, "What Is a Reasonable Demand? Islamic in Swedish Textbooks," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 1, no. 4.2005
- Jorgen S. Nelsen, *Muslims in Western Europe, Second Edition*, England: Edinburgh University Press, 1995.
- Joseph F. O'Callaghan, *A History of Medieval Spain* , New York: Cornell University Press, 1983
- Kanisius(Anggota IKAPI), "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?", Yogyakarta, 2014, hlm.1
- Michael Lipka and Conrad Hackett, "Why Muslims Are the World's Fastest-Growing Religious Group," Pew Research Center, last modified April 6, 2017
- Muhammad Nabel, "Schooling Options for Muslim Children Living in Muslim Minority Countries."
- Muhammad Nabel, "Schooling Options for Muslim Children Living in Muslim Minority Countries."
- Paul Josza, *Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates*, Munster: Waxman, 2007.
- Robert Hefner and Muhammad Qasim, *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education* New Jersey: Princeton University Press, 2007
- Made Saihu, Sawaluddin Siregar, Pemenuhan Biaya Pendidikan Melalui Entrepreneurship (Studi Pada Mahasiswa STIT Al-Amin Kreo Tangerang), *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 11, No 01 (2022)
- Faisal Musa, Sawaluddin, Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI: Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam di Madrasah, *MATAAZIR: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Januari-Juni 2020

Thomas Schmidinger, *Islam, Migration, and the Muslim Communities in Europe: History, Legal Framework, and Organizations*, artikel dalam *Looming Shadows. Migration and Integration at a Time of Upheaval—European and American Perspectives*, Washington, DC: Center for Transatlantic Relations, 2011

Velinger Beraud, *Religion and Education in the France and Spanish*, France: Distant Cousins, 2008